

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basu, Swastha DH. 1985. *Asas- Asas Manajemen Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Barda Nawawi, Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, A'an, dan Freddy, Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Juniarso, Ridwan dan Achmad, Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Namawi, Hadari. 1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama
- M, Manullang. 1977. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- M, Syamsudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo
- Mukti, Fajar ND, dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Paulus E, Lotulung. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Philipus M, Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwoto. 1994. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo
- Soerjono, Soekanto. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sri Pudyatmoko. Y . 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : Grasindo
- Viktor M, Situmorang dan Jusuf, Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta

W.F, Prins dan R. Kosim, Adisapoetra. *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita

Wahyu, Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung : UNILA

Penulisan Hukum

Suparto, Wijoyo. 2005. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)* Edisi kedua. Surabaya : Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

R.I. Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Jurnal

Gandaria, R.Y. (2015). Implentasi Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance and Clean Government Di Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*. Vol. 3 No.6.

Kartika, M.E. (2016). Hukum yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 3.

Lubna, L. (2015). Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3 No. 7.

Lubis, M. (2018). Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembagunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 1 No. 1.

Nasution, B.J. (2014). Upaya Penerapan Sanksi Administratif dan Perizinan sebagai Pembatasan terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48 No. 1.

Nasution, B.J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol.3 No.2.

Raharja, I.F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No.2.

Ravena, D. (2014). Wacana Konsep hukum Progresif dalam penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 23. No. 2.

Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.6 No. 4.

Wahid, A.A. (2017). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*. Vol. 02 No.1.

Website

Ujang, Hasanudin. 2018. "Melanggar Izin, Pengelola Karaoke Pantai Samas Didenda Rp10 Juta". <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/12/51/910003/melanggar-izin-pengelola-karaoke-pantai-samas-didenda-rp10-juta>. Diakses pada tanggal 06 November 2018 jam 22.15 WIB

David Watts, Barton. 2018. "A Short History of Karaoke in Japan". <http://japanology.org/2018/02/history-of-karaoke-japan>. Diakses pada tanggal 06 November 2018 jam 22.15 WIB